



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir 05 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.04 RW.01 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, lahir 10 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.04 RW.01 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca permohonan para Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada 21 September 2020 dengan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Calon Suami  
Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 13 April 2002 (usia 18 tahun 5 bulan)  
Agama Islam  
Pendidikan/Pekerjaan SLTA/ belum bekerja  
Tempat Kediaman di RT.04 RW.01 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Buay

Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama Calon Istri  
Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 06 Oktober 1999  
Agama Islam

Pendidikan/Pekerjaan SLTA/petani  
Tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur,  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 17-09-2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Mei 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga

Halaman 2 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan II sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;

5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan II berstatus Gadis/Perawan, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Hakim tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (Calon Suami) dengan calon suaminya (Calon Istri);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Halaman 3 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Calon Suami dengan calon suaminya bernama Calon Istri ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun 05 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun ;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak kami benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa, kami dan orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama, semakin menimbulkan aib keluarga ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, dan tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

---

Halaman 4 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, selanjutnya anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah ingin menikah dengan seorang laki laki bernama Calon Istri dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal sejak lama serta telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun dan sangat serius menjalin cinta, bahkan sudah bertunangan pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengalami menstruasi sejak usia 12 tahun dan rutin setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja tetapi calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang layak yakni sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- perbulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon selanjutnya calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Istri;
- Bahwa saya menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon cukup lama, kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan kami sudah bertunangan pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa, kami sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga untuk kemaslahatan kami ingin menghalalkan hubungan kami;

---

Halaman 5 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status kami adalah perjaka dan gadis ;
- Bahwa, saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selain itu saya sudah bekerja sebagai buruh harian dan bertani dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak calon suami anak yang bernama Kakak, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Rt. 003 Rw. 002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan; selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak dari anak yang bernama Anak ;
- Bahwa, benar kami berencana untuk menikahkan anak kami dengan anak Pemohon bernama Calon Suami ;
- Bahwa, benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa, antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan serta setahu kami anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, antara anak saya dan anak Pemohon telah bertunangan pada 27 April 2019 dan telah diterima oleh para Pemohon, namun karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, sehingga memerlukan izin dari Pengadilan untuk dapat menikahnya;

---

Halaman 6 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sebagai orangtua dengan calon mempelai sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa, kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon atas nama Pemohon dengan NIK xxxxxxxxxx, tertanggal 19 April 2012 dan atas nama xxxxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxx, tertanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx anak Pemohon (Pemohon dan xxxxxxxxxx) tertanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor xxxxxxxxxx atas nama Calon Suami, tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen, bukti P.4.
5. Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah, Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx anak Pemohon (Pemohon dan xxxxxxxxxx) tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah MA Nahdlatul Ulama Sumber

Halaman 7 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kabupaten OKU Timur telah dimeteraikan kembali dengan cukup/di nachtzegelen, bukti P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Anak calon suami anak Pemohon tertanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6.

## B. Saksi - saksi :

1. Saksi I, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 18 Tahun, sedangkan calon suami berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, tidak bisa dipisahkan, karena mereka bersama bahkan sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain atau pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 8 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri, anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di SMA, serta selain itu anak Pemohon juga terlihat rajin membantu orangtuanya di rumah, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga, serta ulet dalam bekerja;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh saksi ;

2. Saksi II, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.005 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur. di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi dengar rencana pernikahan anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bareng, bahkan mereka sudah bertunangan pada tahun 2020;
- Bahwa, jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih lagi yang dilarang oleh Agama dan akan menjadi aib keluarga, serta juga demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 9 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua calon pengantin adalah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya adalah gadis dan pe-  
rjaka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa, ulet dalam bekerja dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan orangtua, begitupun anak Pemohon sudah terlihat naluri keibuannya serta rajin membantu orangtuanya untuk pekerjaan rumah;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon menyampaikan

Halaman 10 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak sehingga rumusan pasal 10 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Suami, (umur 18 tahun 05 bulan), dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, karena anak Pemohon belum berumur 19 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suaminya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, merupakan alat-alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan

---

Halaman 11 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah dimeteraikan kembali dengan cukup/dinachtzegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti pada perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, KTP atas nama anak pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Calon Suami tersebut berusia 18 tahun 05 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah/Kartu Identitas Anak/Surat keterangan lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah MA Nahdlatul Ulama Sumber Agung Kabupaten Oku Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa foto kopi KTP atas nama calon mempelai laki-laki dari anak pemohon yang memberi bukti bahwa calon pengantin laki-laki telah cukup umur (21 tahun) untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

---

Halaman 12 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020  
tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon Calon Istri dan orangtua Anak , alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Suami , telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Istri ;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon Istri tersebut sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan Sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan telah bertunangan pada 27 April 2019, dan bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon Istri tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Istri berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

---

Halaman 13 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja dan calonnya yakni Calon Istri sudah bekerja sebagai buruh harian dan petani dan berpenghasilan yang cukup selain itu kedua orangtua sepakat untuk membantu dalam hal ekonomi kedepannya;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suamiya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Istri hanya kurang satu syarat yaitu belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1

---

Halaman 14 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana para Pemohon selaki orangtua sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama), sehingga Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan

---

Halaman 15 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini calon suaminya anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial calon suami anak Pemohon belum bekerja, namun akan berusaha untuk kedepannya dan orangtua dari anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, telah bersepakat dalam membantu untuk kecukupan ekonomi serta mencari pekerjaan untuk kedua calon pengantin kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan pada tanggal 27 April 2019 serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

---

Halaman 16 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama Calon Istri ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Calon Suami untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Istri ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim.

Halaman 17 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Martapura, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

Hakim Tunggal,  
ttd

Nur Anwar, S.H.I.,

Kuala Akbar Andalas, S.HI.,

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Proses	Rp. 50.000,00
3	Panggilan	Rp 300.000,00
4	PNBP	Rp. 20.000,00
5	Redaksi	Rp. 10.000,00
6	Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	RP. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Mpr.